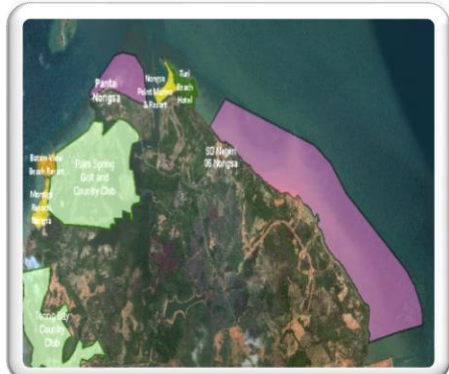




PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020



DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2020. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam serta Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2016-2021. Dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas pada tahun 2020, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun 2020 yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan



pada Tahun 2020 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di Tahun 2020.

Akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Ke-ciptakaryaan yang berkelanjutan.

Batam, Februari 2021
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



SUHAR, ST
Pembina TK. I
NIP. 19740316 200003 1 003



DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	5
1.4.1. Tugas pokok dan fungsi OPD	6
a. Sekretariat	9
b. Bidang Prasarana Bangunan Gedung	9
c. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	10
d. Bidang Tata Ruang	10
e. Bidang Bina Konstruksi	10
f. Kelompok Jabatan Fungsional	11
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	11
1.4.2. Struktur Organisasi	11
1.4.3. Sumber Daya Manusia	12
1.4.4. Sarana dan Prasarana	14
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1. RENCANA STRATEGIS	20
2.2. VISI DAN MISI	21
a. Visi	21
b. Misi	21
2.3. TUJUAN DAN SASARAN	22
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN	22
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
2.6. PERENCANAAN KINERJA	24
2.7. PENETAPAN KINERJA	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	28
3.1. EVALUASI KINERJA	29
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	30
3.3. REALISASI KEUANGAN	42



BAB IV PENUTUP	44
4.1. KESIMPULAN	44
4.2. REKOMENDASI	46



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Hubungan Sasaran Strategis Dengan Program OPD
Tabel 1.2 : SDM Menurut Golongan
Tabel 1.3 : SDM Menurut Pendidikan
Tabel 1.4 : SDM Menurut Penempatan
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran
Tabel 2.2 : Program dan Kegiatan
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.4 : Perencanaan Kinerja
Tabel 2.5 : Penetapan Kinerja
- Tabel 3.1 : Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2 : Analisis Pencapaian Sasaran I
Tabel 3.3 : Rekapitulasi Pengawasan
Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi
Tabel 3.5 : Analisis Pencapaian Sasaran II
Tabel 3.6 : Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang
Tabel 3.7 : Analisis Pencapaian Sasaran III
Tabel 3.8 : Rekapitulasi Sr Air Bersih Kota Batam S.D Akhir Tahun 2020
Tabel 3.9 : Rekapitulasi Sr Sanitasi Kota Batam S.D Akhir Tahun 2020
Tabel 3.10 : Analisis Pencapaian Sasaran IV
Tabel 3.11 : Realisasi Keuangan BTL dan BL
Tabel 3.12 : Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran/Program/Kegiatan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 yang memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Inpres no 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dari analisis terhadap 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) indikator Kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis I** : meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak. Didukung anggaran dari Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan sebesar **Rp. 30,290,242,367.04** atau **38.82 %** dari Total Belanja



Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 25,748,201,533.18** atau **33.00 %**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :

- Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan keamanan dan kenyamanan. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **174.66 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**
- Penyelenggaraan bangunan gedung. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**

- **Sasaran Strategis II** : Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten. Didukung anggaran dari program Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang sebesar **Rp. 318,458,000.00** atau **0.41 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 278,505,000.00** atau **0.36%**

Terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yakni :

- Ketersediaan dokumen tata ruang dan kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **150.51 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**

- **Sasaran Strategis III** : Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland. Didukung anggaran dari Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi sebesar **Rp. 43,665,448,556.20** atau **55.96 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 43,207,259,924.67** atau **55.37 %**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **105.23 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**



- Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **106.34 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**
- **Sasaran Strategis IV** : didukung anggaran dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. **2,002,888,000.00** dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. **1,754,588,900.00 (Rp. 3.757.476.900,-)** atau **4.82 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 3.357.339.875,25** atau **4.30 %**
Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :
 - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**
 - Cakupan sarana dan prasarana aparatur. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**

Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, capaian kinerja rata-rata pada tahun 2020 dengan interpretasi **Melampaui Target.**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 87.831.013.101,84** dan realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 81.967.587.431,10** mencapai **93.32 % terdiri dari :**

- a. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis/Belanja Langsung sebesar **Rp. 78.031.625.823,24** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 72.591.306.333,10** dengan prosentase penyerapan keuangan sebesar **82.65 %**.
- b. Alokasi anggaran untuk pencapaian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 9.799.387.278.60** dengan realisasi anggaran



sebesar **Rp. 9.376.281.098,-** dengan prosentase penyerapan keuangan sebesar **10.68 %**.

Capaian indicator outcome dalam tahun 2020 telah tercapai yaitu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bata mini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjaabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas dan Transparansi pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2020 ini pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap Kinerja/Realisasi yang telah dilakukan selama tahun 2020. Penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan



upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

LKjIP tahun 2020 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2016-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Kota Batam Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada public baik yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2020

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020 mengacu pada :



1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri PAN & RB Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
15. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
16. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
17. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam No. 108);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP tahun 2020 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai penjabaran dari Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Sehingga LKjIP ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2021 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mempunyai beberapa sasaran strategis dalam RPJMD 2016-2021. Sasaran srategis tersebut yang kemudian dituangkan dalam beberapa program dalam rencana strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun anggaran 2016-2021. Untuk melihat hubungan sasaran srategis dan program OPD dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 1.1 :
HUBUNGAN SASARAN STRATEGIS DENGAN PROGRAM OPD

No	Sasaran Strategis	Program OPD	Ket
1	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	
3	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	
4	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yang terdiri atas :

- a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara



- telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *Reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
 - f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. menyelenggarakan sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;



- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas oleh para Kepala Bidang;
- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan Penerimaan, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;



- s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terdiri atas :

a. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bidang Prasarana Bangunan Gedung

Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Bangunan Gedung.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari :



- a. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung
- b. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
- c. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

c. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

d. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Ruang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang

e. Bidang Bina Konstruksi

Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Bina Konstruksi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- b. Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi



c. Seksi Bina Kompetensi dan Produksi Jasa Konstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Bersih

UPT AB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan air bersih kepada masyarakat yang sarana dan prasarananya dikelola oleh OPD.

Susunan organisasi UPT AB terdiri dari :

- Kepala UPT AB
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara

UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara terdiri dari :

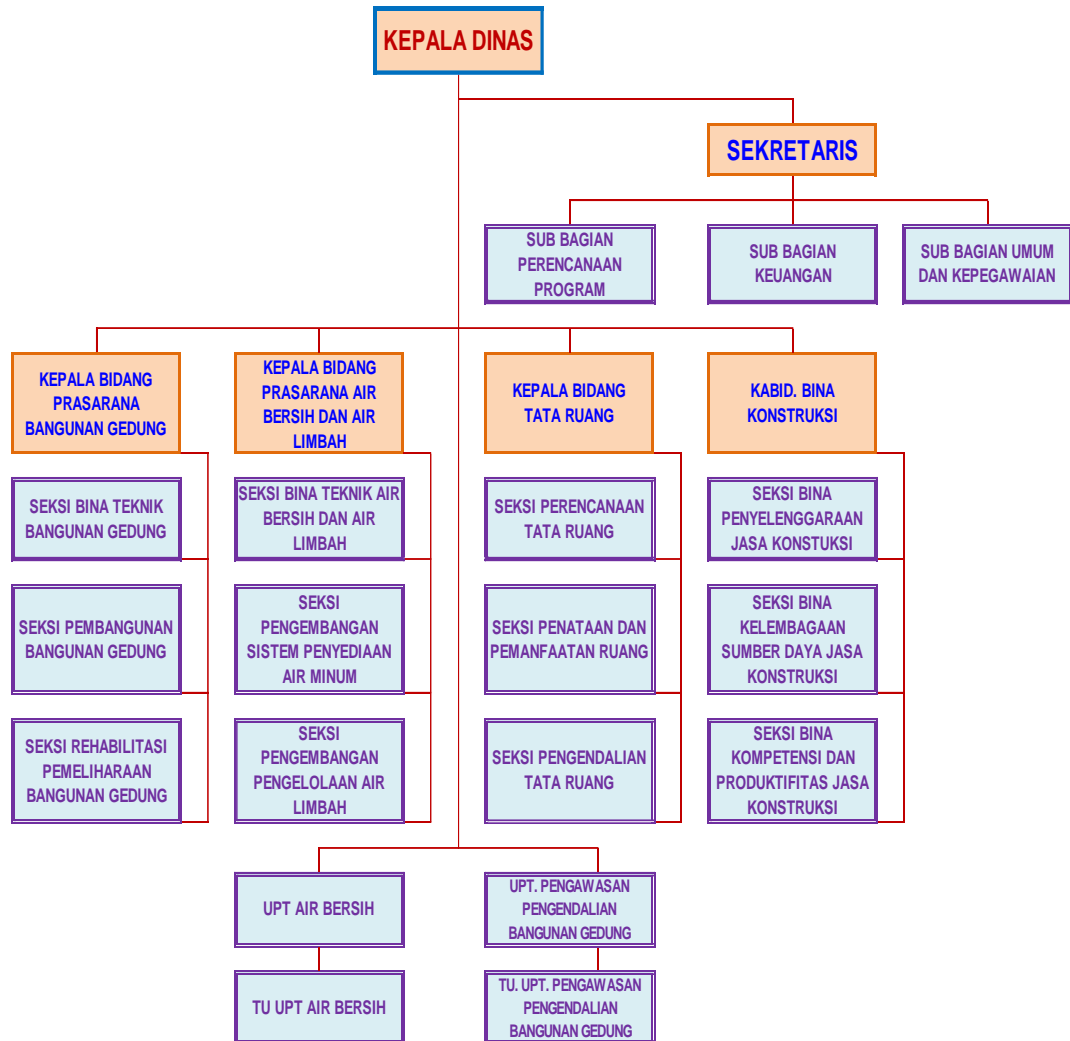
- Kepala UPT AB,
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

1.4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.



STUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

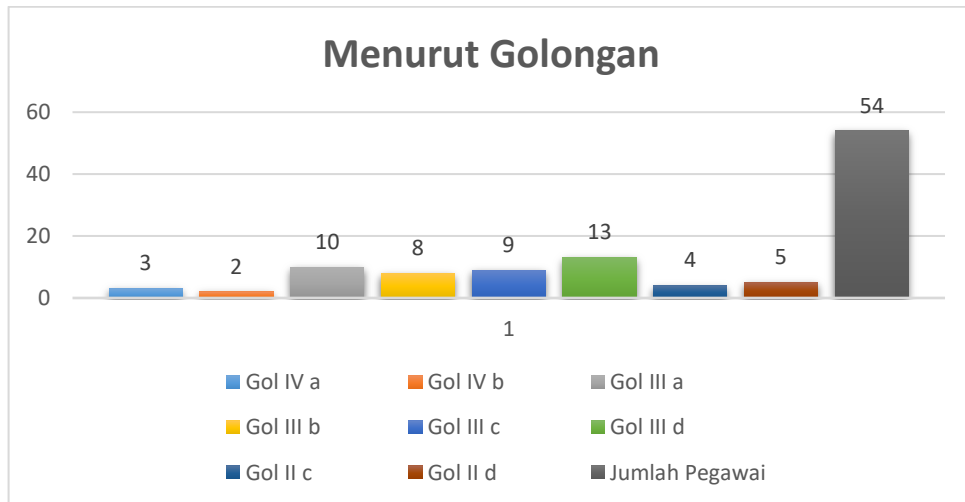


1.4.3. Sumber Daya Manusia

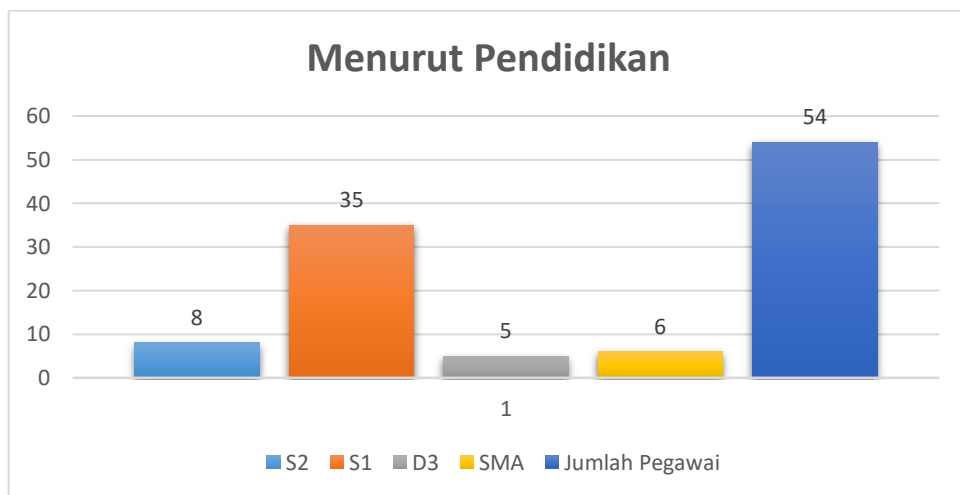
Sumber Daya Manusia yang didalam pemerintahan disebut dengan Sumber Daya Aparatur, merupakan unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintah dan memegang peranan utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target dan sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sampai akhir tahun RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.



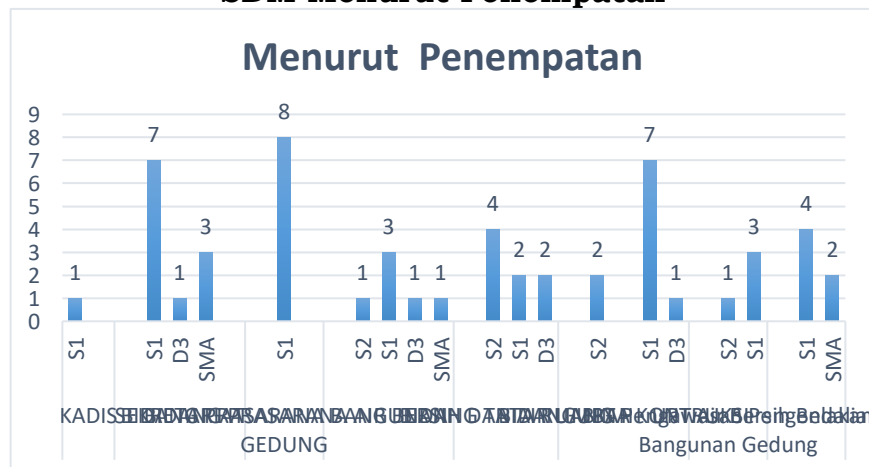
**Tabel 1.2 :
SDM Menurut Golongan**



**Tabel 1.3 :
SDM Menurut Pendidikan**



**Tabel 1.4 :
SDM Menurut Penempatan**



Untuk meningkatkan kinerja OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian terutama bidang teknis dan administrasi pemerintahan merupakan hal penting yang harus dipenuhi kedepannya. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan keahlian tersebut diharapkan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam akan lebih optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target dan sasaran dinas dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.

1.4.4. Sarana dan prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengelola beberapa sarana dan Prasarana yaitu :

Tabel 1.5 :
Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	SWRO Belakang Padang	1 unit	Belakang Padang (768 SR/3.072 jiwa)
2	WTP Pulau Mecan	1 unit	Sekanak Raya Belakang Padang (293 SR/1.160 jiwa)
3	WTP Pemping	1 unit	P. Labon, P. Pemping, P. Mongkol Belakang Padang (200 SR/800 jiwa)
4	WTP Belakang Padang	1 unit	Belakang Padang (1.158 SR/9.264 jiwa)
5	WTP Bulang Lintang	1 unit	Bulang Lintang, Bulang Kebam Bulang (217 SR/868 jiwa)
6	WTP Sembulang	1 unit	Sembulang Galang (81 SR/324 jiwa)
7	WTP Pulau Abang	1 unit	P. Abang Galang (286 SR/1.144 jiwa)
8	WTP Air Raja	1 unit	Air Raja Galang (160 SR/640 jiwa)
9	WTP Pulau Terong	1 unit	P. Terong Belakang Padang (268 SR/1.072 jiwa)
10	WTP Pulau Setokok	1 unit	P. Setokok Bulang (109 SR/436 jiwa)
11	WTP Pulau Kasu	1 unit	Kasu Belakang Padang (218 SR/872 jiwa)
12	IKK Pulau Lance	1 unit	P. Lance Sagulung (31 SR/124 jiwa)
13	WTP Pulau Pecong	1 unit	P. Pecong Belakang Padang (242 SR/986 jiwa)



14	IKK Pulau Buluh	1 unit	P. Buluh Bulang (545 SR/2.180 jiwa)
15	WTP Subang Mas	1 unit	Subang Mas Galang (69 SR/276 jiwa)
16	IKK Pulau Tiangwangkang	1 unit	P. Tiangwangkang (61 SR/244 jiwa)
17	IKK Pulau Pulau Panjang	1 unit	P. Panjang Bulang (125 SR/500 jiwa)
18	IKK Pulau Akar	1 unit	P. Akar Bulang (104 SR/416 jiwa)
19	IKK Tanjung Gundap	1 unit	Tanjung Gundap Sagulung (111 SR/444 jiwa)
20	WTP Pulau Geranting	1 unit	P. Geranting Belakang Padang (195 SR/780 jiwa)
21	WTP Rempang Cate	1 unit	Rempang Cate Galang (138 SR/552 jiwa)
22	WTP Pulau Ngenang	1 unit	Ngenang Nongsa (105 SR/420 jiwa)
23	WTP Pulau Jaloh	1 unit	P. Jaloh Bulang (232 SR/928 jiwa)
24	Kantor Dinas	1 unit	
25	Kendaraan dinas roda 4	5 unit	
26	Kendaraan dinas roda 2	2 unit	
27	Kendaraan dinas roda 3	1 unit	
28	Waduk Belakang Padang	Waduk I (Tg. Sari), Waduk II (Sekanak Raya), Instalasi Pengolahan Air/IPA (Sekanak Raya), Rumah Jaga (Sekanak Raya) dan Kantor (Sekanak Raya)	
29	Waduk Air Raja	Waduk/Intake (setelah kuburan), Instalasi Pengolahan Air/IPA (setelah kuburan), Rumah Jaga (setelah kuburan), Kantor Jaga (setelah kuburan) dan Reservoir (dekat SMU)	
30	Waduk Pulau Terong	Waduk (Teluk Kangkung), Instalasi Pengolahan Air/IPA (Teluk Kangkung), Rumah Jaga (Teluk Kangkung), Ruang Genset (Teluk Kangkung) dan Reservoir (P. Terong)	
31	Waduk Sembulang	Tampungan Air (Dapur 6 Sembulang), Reservoir (Dapur 6 Sembulang), Ruang Genset (Dapur 6 Sembulang), dan Instalasi Pengolahan Air/IPA (Dapur 6 Sembulang)	
32	Waduk Pulau Pemping	Waduk, Reservoir (Pemping), Instalasi Pengolahan Air/IPA (Pemping), Rumah Jaga (Pemping), Ruang Genset (Pemping) dan Reservoir (labun)	
33	Waduk Setokok	Waduk (Setokok), Rumah Genset (Setokok), Instalasi Pengolahan Air/IPA (Setokok), dan Rumah Jaga (Setokok)	
34	Waduk Pulau Abang	Waduk, Ruang Genset, Reservoir, dan Ruang Genset	
35	Waduk Bulang Lintang	Waduk (Bulang Lintang), Rumah Jaga (Bulang Lintang), Ruang Genset (Bulang Lintang), dan Reservoir (Bulang Kebam)	
36	Waduk Tiangwangkang	Bunker/penampung dari ATB (Tiangwangkang), Reservoir (Tiangwangkang), Rumah Jaga (Tiangwangkang), Ruang Genset (Tiangwangkang), Reservoir (P. Lance), Ruang Genset (P. Lance), Reservoir (P. Panjang), Reservoir (P. Panjang), Reservoir (P. Akar) dan Rumah Jaga (P. Akar)	
37	Waduk Pulau Mecan	Waduk (P. Mecan), Reservoir (P. Mecan), Instalasi Pengolahan Air/IPA (P. Mecan), Ruang Genset (P. Mecan), Reservoir (P. Sarang)	
38	Waduk Pulau Kasu	Reservoir (P. Kasu), Waduk (P. Lumba), Rumah Jaga (P. Lumba), Ruang Genset (P. Lumba)	



39	Waduk Pulau Pecung	Reservoir (P. Pecung), Waduk (P. Kerang), Waduk (P. Kerang), Instalasi Pengolahan Air/IPA (P. Kerang), Rumah Jaga (P. Kerang), Rumah Genset (P. Kerang)
40	SR AB Belakang Padang	1.357 SR
41	SR AB Pemping	120 SR
42	SR AB Bulang Lintang	143 SR
43	SR AB Pulau Buluh	530 SR
44	SR AB Sembulang	105 SR
45	SR AB Pulau Abang	245 SR
46	SR AB Teluk Lunggu	64 SR
47	SR AB Pulau Mecan	60 SR
48	SR AB Bulang Kebam	149 SR
49	SR AB Pulau Labun	60 SR
50	SR AB Pulau Terong	264 SR
51	SR AB Air Raja	178 SR
52	SR AB Pulau Kasu	134 SR
53	SR AB Setokok	100 SR
54	SR AB Tiangwangkang	60 SR
55	SR AB Pulau Lance	26 SR
56	SR AB Pulau Panjang	131 SR
57	SR AB Pulau Akar	122 SR
58	SR AB Pulau Mongkol	88 SR
59	SR AB Pulau Sarang	81 SR
60	SR AB Pulau Pecung	247 SR
61	SR SS Pulau Mecan	25 SR, MCK+, KSM P. Mecan
62	SR SS Pulau Geranting	25 SR, MCK+, KSM P. Geranting
63	SR SS Pemping	38 SR, 2 IPAI Komunal, KSM Lancang Kuning
64	SR SS Pulau Pecung	41 SR, KSM Pecong Mandiri
65	SR SS Pulau Bulang Lintang	25 SR, MCK+, KSM P. Bulang Lintang
66	SR SS Pulau Jaloh	25 SR, MCK+, KSM P. Jaloh
67	SR SS Bulang Kebam	25 SR, MCK+, KSM Bulang Kebam
68	SR SS Setokok	70 SR, 3 IPAI Komunal, CV. Adela Pratama
69	SR SS Air Raja	38 SR, 2 IPAI Komunal, KSM Air Raja
70	SR SS Pulau Abang	132 SR, 3 IPAI Komunal, KSM Pulau Abang
71	SR SS Subang Mas	41 SR, KSM Subang Mas Cemerlang
72	SR SS Sagulung	57 SR, 3 IPAI Komunal, KSM Tiangwangkang Sukses
73	SR SS Kec. Nongsa	44 SR, KSM Punggur Sehat Sejahtera
74	SR SS Kel. Tg. Sengkuang	23 SR, Ipal Komunal, KSM Tanjung Sengkuang
75	SR SS Kp. Bukit Tg. Riau	29 SR, IPAL KOMUNAL, KSM Kampung Bukit
76	SR SS Kel. Tg. Riau	25 SR, MCK+, KSM Pulau Seraya



77	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Mecan	Pulau Mecan Belakang Padang (25 SR/100 jiwa)
78	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Geranting	P. Geranting Belakang Padang (25 SR/100 jiwa)
79	SS Air Limbah Lingkungan Pemping	Pemping Belakang Padang (38 SR/152 jiwa)
80	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Pecung	P. Pecung Belakang Padang (42 SR/168 jiwa)
81	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Bulang Lintang	P. Bulang Lintang Bulang (25 SR/100 jiwa)
82	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Jaloh	P. Jaloh Bulang (25 SR/100 jiwa)
83	SS Air Limbah Lingkungan Bulang Kebam	Bulang Kebam Bulang (25 SR/100 jiwa)
84	SS Air Limbah Setokok	Setokok Bulang (70 SR/280 jiwa)
85	SS Air Limbah Lingkungan Air Raja	Air Raja Galang (38 SR/152 jiwa)
86	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Abang	P. Abang Galang (132 SR/528 jiwa)
87	SS Air Limbah Lingkungan Subang Mas	Subang Mas Galang (41 SR/164 jiwa)
88	SS Air Limbah Lingkungan Sagulung	Sagulung (57 SR/228 jiwa)
89	SS Air Limbah Lingkungan Kabil	Kabil Nongsa (34 SR/136 jiwa)
90	SS Air Limbah Lingkungan Tg Sengkuang	Tg. Sengkuang Batu Ampar (23 SR/92 jiwa)
91	SS Air Limbah Lingkungan Kampung Bukit	Kampung Bukit Sekupang (29 SR/116 jiwa)
92	SS Air Limbah Lingkungan Tg. Riau	Tg. Riau Sekupang (25 SR/100 jiwa)
93	SS Air Limbah Lingkungan Ngenang	Ngenang Nongsa (80 SR/400 jiwa)
94	SS Air Limbah Lingkungan Kasu	Kasu Belakang Padang (205 SR/1.025 jiwa)
95	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Mecan	P. Mecan Bekakang Padang (38 SR/190 jiwa)



96	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Sarang	P. Sarang Belakang Padang (40 SR/200 jiwa)
97	SS Air Limbah Lingkungan Lengkang	Lengkang Belakang Padang (40 SR/200 jiwa)
98	SS Air Limbah Lingkungan Pulau Sekanak Raya	P. Sekanak Raya Belakang Padang (60 SR/300 jiwa)
99	SS Air Limbah Lingkungan Kel. Karas Kec. Galang	Kel. Karas Galang (84 SR/420 jiwa)
100	SS Air Limbah Lingkungan P. Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung	P. Lance Sagulung (35 SR/175 jiwa)
101	SS Air Limbah Lingkungan Kel. P. Terong Kec. Belakang Padang	P. Terong Belakang Padang (105 SR/525 jiwa)

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan hal-hal umum tentang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam serta uraian singkat tentang gambaran umum Dinas.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, serta gambaran singkat sasaran yang diraih oleh Dinas pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi dan perjanjian kerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala

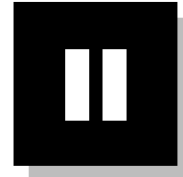


dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



2.2. VISI DAN MISI

Penetapan visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan misi yang akan dilaksanakan

a. Visi

Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2016–2021 kedepan adalah :

“Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dan Berkarakter Dengan Infrastruktur Perkotaan yang Nyaman, Moderen, dan Berkelanjutan “

b. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Misi I Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan optimalisasi pembiayaan pembangunan.

Misi II Mewujudkan Tata Ruang Kota Batam yang Berkarakter Budaya Madani dan Berwawasan Lingkungan.

Misi III Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland.

Misi IV Meningkatkan Penyediaan, Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan.



2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1. :
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi Cakupan sarana dan prasarana aparatur
2	Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam
3	Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas, serta permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan
4	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses hinterland	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam meliputi :

Tabel 2.2. :
Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana



	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perkantoran Pemerintahan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	5. Operasional UPT Air Bersih 6. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih 7. Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi 8. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD 9. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam 10. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi) 11. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler) 12. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam 13. Pemasangan SR (sambungan rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam 14. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK AFIRMASI)
4	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	15. Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam 16. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam 17. Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pemanfaatan Kawasan
5	Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	18. Pembangunan Masjid Agung Kota Batam 19. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan 20. Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi 21. Revitalisasi Masjid di Kota Batam

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.



Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. :
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rencana Pencapaian IKU						Akhir Tahun 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dokumen	-	88	273	192	196	196	945
2	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	Bangunan	665	240	250	305	370	380	2.210
3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	unit	8	36	47	42	46	46	225
4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persen	29	31.37	33.18	35.16	37.29	39.55	39.55
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	2.44	3.4	4.74	6.41	8.4	10.90	10.90
6	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100

2.6. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kota Batam melalui belanja langsung sebesar **Rp 206.695.723.908,41**



kemudian pada APBDP 2020 menjadi **Rp. 78.031.625.823,24**, guna melaksanakan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2016 s/d 2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2016 -2021 Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4. :
Perencanaan Kinerja

Sasaran	Indikator	Target (%)	Program/Kegiatan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	196 dokumen	Program : Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kegiatan : 1. Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam 3. Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pemanfaatan Kawasan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	438 bangunan	Program : Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan Kegiatan : 1. Pembangunan Masjid Agung Kota Batam 2. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan 3. Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi 4. Revitalisasi Masjid di Kota Batam
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15 unit	
Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	39.55 %	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Kegiatan : 1. Operasional UPT Air Bersih 2. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih 3. Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi 4. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD 5. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam 6. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi) 7. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler) 8. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam 9. Pemasangan SR (sambungan rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam 10. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK AFIRMASI)
	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	10.10 %	



2.7. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Agar supaya pencapaian indikator kinerja berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan perlu suatu komitmen bersama antara pimpinan OPD (Kepala Dinas) dengan Walikota Batam dalam suatu Penetapan Kinerja sebagaimana daftar berikut :

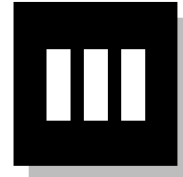
Tabel 2.5. :
Penetapan Kinerja

Sasaran	Indikator	Target (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.002.888.000,-
	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan	1.599.047.000,-
				3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.000.000,-
				4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.541.900,-
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	196 dokumen	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	5. Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam	131.900.000,-
				6. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam	75.008.000,-
				7. Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pemanfaatan Kawasan	111.550.000,-
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	438 bangunan	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	8. Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam	18.799.986.312,34
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15 unit		9. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan	5.240.161.704,70
				10. Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi	111.000.000,-
				11. Revitalisasi Masjid di Kota Batam	6.139.094.350,-
Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	39.55 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	12. Operasional UPT Air Bersih	6.361.073.880,-
				13. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih	7.477.418.889,20
				14. Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi	1.234.549.375,-
				15. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD	3.628.030.114,02



				16. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam	4.586.322.819,98
				17. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi)	16.807.495.000,-
				18. Pemasangan SR (sambungan rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam	273.371.000,-
	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	10.10 %		19. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler)	1.250.000.000,-
			20. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam	1.147.187.478,-	
			21. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK AFIRMASI)	900.000.000,-	
J U M L A H				78.031.625.823,24	





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- Realisasi >Target : Melampaui Target



- Realisasi = Target : Mencapai Target
- Realisasi < Target : Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan 4 sasaran dan 7 indikator kinerja.

3.1. EVALUASI KINERJA

Secara umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021. Terdapat 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	Bangunan	305	508	166.56	438	765	174.66	Melampaui Target
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Unit	42	52	123.81	15	15	100	Melampaui Target
3	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dokumen	192	343	178.65	196	295	150.51	Melampaui Target
4	Tersedianya infrastruktur air bersih dan	Persentase penduduk yang mendapatkan	Persen	37.29	39.04	104.69	39.55	41.62	104.69	Melampaui Target



	sanitasi di hinterland	akses air minum yang aman												
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	8.4	9.18	109.29	10.10	10.74	106.34	Melampaui Target				

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 3.2. :
 Analisis Pencapaian Sasaran I**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun	Bangunan	665	240	240	100	250	250	100	305	508	166.56	438	475	174.66	105.425
2	Penyelenggaraan bangunan gedung	unit	8	36	36	100	47	46	97.87	42	52	123.81	15	15	100	

Pengukuran terhadap bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan terhadap bangunan/menara milik masyarakat umum, baik itu digunakan untuk fasilitas yang digunakan untuk umum maupun pribadi. Pengawasan bangunan gedung/menara dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di laksanakan oleh UPT Pengawasan



bangunan gedung dan menara. Pengawasan ini menerapkan sanksi Perda tahap pertama yakni memberikan peringatan tertulis yakni berupa surat pemberitahuan, bahwa terdapat pelanggaran fungsi/persyaratan/penyelenggaraan bangunan gedung dan menara dilapangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Selama tahun 2020 pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. :
Rekapitulasi Pengawasan

No	Uraian	Jenis Bangunan/Menara	Jumlah	Ket
1	Pengawasan Bangunan Gedung	Rumah Tinggal, Ruko, Workshop/Gudang, sekolah	20	Tidak Memiliki IMB
2	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	209	Tidak Memiliki IMB, Jangka waktu IMB Habis dan Menara yang dibongkar
3	Rekomendasi Titik Menara	Persetujuan Titik Menara	63	
4	Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Seluruh Jenis Bangunan Gedung	473	
J U M L A H			765	

Pengukuran terhadap sarana dan prasarana fasilitas umum perkotaan berupa penyelenggaraan bangunan gedung yakni Pembangunan, Rehabilitasi maupun revitalisasi. Kondisi gedung fasilitas umum yang kurang representative yakni kondisi gedung yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan layanan dan perkembangan tingkat kebutuhan saat ini dapat dilakukan pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi. Peningkatan kualitas dimaksudkan agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan sekaligus beautifikasi secara fisik dan dapat menampilkan performance sarana prasarana gedung yang lebih representative. Selama tahun 2020 peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.4. :
Rekapitulasi pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dataran Engku Putri	1 unit	
2	Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre	1 unit	
3	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre	1 unit	
4	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 12 RT 01 Sungai Nayon	1 unit	
5	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 04 RW 05 Perum. Citramas Indah Kelurahan Batu Besar - Kecamatan Nongsa	1 unit	
6	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 01 RW 13 Kav. Bida Kabil - Kel. Kabil	1 unit	
7	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 16 Kav. Bida Kabil Kelurahan Kabil - Kecamatan Nongsa	1 unit	
8	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 03 RW 04 Kavling Nongsa Kelurahan Sambau - Kecamatan Nongsa	1 unit	



9	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 04 RW 03 Kavling Kabil Kelurahan Sambau - Kecamatan Nongsa	1 unit	
10	Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Karas	1 unit	
11	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Cluster Puri Legenda Blok A. RT. 03 dan 04 RW. 07 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota	1 unit	
12	Pembangunan Gedung Serbaguna RT.001 RW.001 Kelurahan Sijantung Kec. Galang	1 unit	
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Hidayah Batu Besar Nongsa	1 unit	
14	Pembangunan Gedung Serba Guna Aku Tahu RT. 01, 02 RW. 05 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota	1 unit	
15	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Griya KPN RW. 41 RT. 05, 02 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota	1 unit	
JUMLAH		15 unit	

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum menjadi lebih representative
2. Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama mencapai target yang ditetapkan
3. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan bangunan/gedung untuk fasilitas umum dapat segera dilakukan

Sasaran Strategis II
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

Tabel 3.5. :
Analisis Pencapaian Sasaran II

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dokumen	-	88	88	100	273	273	100	192	343	178.65	146	2995	1551	58.33%

Ruang lingkup penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Kota Batam meliputi pengaturan mengenai kegiatan pemanfaatan dan pemantauan serta pengendalian ruang. Peraturan yang digunakan



saat ini adalah Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Kawasan Batam, Bintan Karimun, ini disebabkan Perda RTRW Kota Batam sampai saat ini belum disahkan sehingga Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2004-2014 yang meliputi pengaturan peruntukan matra darat dan laut dalam satu kesatuan integral dianggap kurang sesuai lagi terhadap pesatnya pertumbuhan dan dinamika kegiatan masyarakat Kota Batam saat ini.

Penataan Kesesuaian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW Kota Batam No. 2 Tahun 2004 dan Perpres No 87 Tahun 2011 dalam membangun diukur berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai pengganti fatwa planologi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan jumlah titik menara yang direkomendasikan merupakan salah satu komponen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan membangun yakni untuk kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

Berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama Tahun 2020 :

Tabel 3.6. :
Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Ket
1	Rekomendasi Keterangan Rencana Kota (KRK)	293 Dokumen	Se-Kota Batam
2	Dokumen Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam dan Peraturan Zonasi	1 Dokumen	7 Kec
3	Aplikasi Informasi Administrasi KRK (E-KRK) dan Pemanfaatan)	1 Dokumen	
JUMLAH		295 Dokumen	

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Pengawasan yang di lakukan oleh UPT Pengawasan bangunan dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan IMB. Pengawasan rutin yang dilakukan dapat berupa memberikan surat teguran/peringatan bagi yang tidak sesuai aturan. Selain itu keterlibatan perangkat daerah dari terkecil yakni RT/RW, pihak Kelurahan sampai Kecamatan merupakan sarana yang sangat



efektif menyampaikan pesan dan informasi mengenai kesesuaian dalam membangun sesuai dengan Tata Ruang dapat segera disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Faktor-faktor yang menghambat / kendala pencapaian sasaran :

1. Akibat Pandemi Covid 19, anjuran dari Pemerintah Pusat agar merefocusing anggaran, sehingga RDTR untuk 2 Kecamatan ditunda pelaksanaannya dan di anggarakan Kembali di tahun 2021.

Sasaran Strategis III
Tersedianya Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi di Hinterland

**Tabel 3.7. :
Analisis Pencapaian Sasaran III**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persen	29	31.37	31.37	100	33.18	35.78	107.84	37.29	39.04	104.69	34.55	41.62	105.23	105.23
2	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	2.4	3.4	3.4	100	4.74	7.60	160.34	8.4	9.18	109.29	10.10	11.74	106.34	106.34

Pengukuran dilaksanakan atas pemasangan Jaringan air bersih (SR/Sambungan Rumah) di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2020 berjumlah 6.126 SR atau sekitar 24.504 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan pelayanan air bersih diantaranya :



1. Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kec. Bulang (DAK Afirmasi) (159 SR atau 636 jiwa)
2. Pembangunan SPAM Pulau Air Gara dan Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang (DAK Afirmasi) (184 SR atau 736 jiwa)
3. Pembangunan SPAM Tanjung Banun Kec. Galang (98 SR atau 320 jiwa)
4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Rempang Cate Kel. Rempang Cate Kec. Galang (7 SR atau 28 jiwa)
5. Penyambungan Baru/Pelanggan baru (mandiri/berbayar) melalui UPT Air Bersih (60 SR atau 240 jiwa)

Tabel 3.8. :
REKAPITULASI SR AIR BERSIH KOTA BATAM S.D AKHIR TAHUN 2020

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Ket
1	WTP Belakang Padang	1.158	9264	Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
	• Kp.Jawa	148	592	Kel. Sekanak Raya	
	• Pl.Sekanak	114	456	Kel. Sekanak Raya	
	• Kp.Melayu	136	544	Kel. Sekanak Raya	
	• Kp.Bugis Pasir Putih	61	244	Kel. Sekanak Raya	
	• Rawasari	91	364	Kel. Tanjung Sari	
	• Angkatan Laut	16	64	Kel. Tanjung Sari	
	• Kp.Tanjung	157	628	Kel. Tanjung Sari	
	• Kp.Baru	142	568	Kel. Tanjung Sari	
	• Kp.Tengah	67	268	Kel. Tanjung Sari	
	• Pasar	50	200	Kel. Tanjung Sari	
	• Dapur Arang	62	248	Kel. Tanjung Sari	
	• Kp.Tempang	61	244	Kel. Tanjung Sari	
	• Amad Belanda	53	212	Kel. Tanjung Sari	
	2	SWRO Belakang Padang	768	3072	Kec. Belakang Padang
• Kp. Jawa		267	1068	Kel. Sekanak Raya	
• Pl.Sekanak		51	204	Kel. Sekanak Raya	
• Kp.Melayu		9	36	Kel. Sekanak Raya	
• Rawasari		10	40	Kel. Tanjung Sari	
• Kp.Tanjung		178	712	Kel. Tanjung Sari	
• Kp.Baru		13	52	Kel. Tanjung Sari	
• Kp.Tengah		3	12	Kel. Tanjung Sari	
• Lang-Lang Laut		30	120	Kel. Tanjung Sari	
• Pasar		69	276	Kel. Tanjung Sari	
• Kp.Bugis Batu Gajah		138	552	Kel. Tanjung Sari	
3	WTP Bulang Lintang	217	868	Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
	• Bulang Lintang	119	476	Kel. Bulang Lintang	
	• Bulang Kebam	98	392	Kel. Bulang Lintang	
4	WTP Unit Pemping	200	800	Kec. Belakang Padang	
	• Pulau Labun	36	144	Kel. Pulau Pemping	
	• Pulau Pemping	75	300	Kel. Pulau Pemping	



	• Pulau Mongkol	89	356	Kel. Pulau Pemping	
5	WTP Unit Sembulang	80	320	Kel. Sembulang Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
6	WTP Unit Pulau Abang	279	1116	Kec. Galang	Tampungan Air Baku (embung)
	• Pulau Abang	208	832	Kel. Pulau Abang	
	• Air Saga	71	284	Kel. Pulau Abang	
6	WTP Unit Pulau Mecan	293	1160	Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
	• Pulau Mecan	59	236	Kel. Sekanak Raya	
	• Pulau Sarang	77	308	Kel. Sekanak Raya	
	• Pulau Lengkang	154	616	Kel. Sekanak Raya	
8	WTP Unit Pulau Air Raja	157	628	Kel. Air Raja	Tampungan Air Baku (embung)
9	WTP Unit Pulau Terong	268	1072	Kel. Pulau Terong	Mata Air (Brouncapting)
10	WTP Unit Pulau Setokok	109	436	Kel. Setokok	Tampungan Air Baku (embung)
11	WTP Unit Pulau Kasu	218	872	Kel. Pulau Kasu	Tampungan Air Baku (embung)
12	IKK Unit Pulau Lance	31	124	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
13	WTP Unit Pulau Pecong	242	968	Kel. Pulau Pecong	Tampungan Air Baku (embung)
14	IKK Unit Pulau Buluh	545	2180	Kel. Pulau Buluh	Sambungan dari PT. ATB
15	WTP Unit Subang Mas	69	276	Kel. Subang Mas	Tampungan Air Baku (embung)
16	IKK Pulau Tiangwangkang	61	244	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
17	IKK Pulau Pulau Panjang	125	500	Kel. Setokok	Sambungan dari PT. ATB
18	IKK Pulau Akar	104	416	Kel. Setokok	Sambungan dari PT. ATB
19	IKK Tanjung Gundap	111	444	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
20	WTP Unit Pulau Geranting	195	780	Kel. Pulau Terong	Tampungan Air Baku (embung)
21	WTP Unit Rempang Cate	138	552	Kel. Rempang Cate	Tampungan Air Baku (embung)
22	WTP Unit Pulau Ngenang	105	420	Kel. Ngenang	Tampungan Air Baku (embung)
23	WTP Unit Pulau Jaloh	232	928	Kel. Pantai Gelam	Tampungan Air Baku (embung)
24	WTP Pulau Temoyong	159	636	Kel. Temoyong	Tampungan Air Baku (embung)
25	WTP Air Gara/Pulau Bertam	184	736	Kel. Kasu	Tampungan Air Baku (embung)
26	WTP Tanjung Banun	98	320	Galang	Tampungan Air Baku (embung)
J U M L A H		6.126	24.504		

Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2016 s.d 2021 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah melaksanakan 7 kegiatan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 kegiatan (DAK Afirmasi) serta 6 kegiatan yang bersumber dari APBD Kota (termasuk 1 kegiatan yang pengelolaan dana operasionalnya bersumber dari Pendapatan BLUD Penyediaan Air Bersih yang perencanaan keuangannya melalui Rencana Bisnis Anggaran /RBA).



Selain melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih di Hinterland, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga melaksanakan kegiatan infrastruktur untuk menunjang penyediaan sanitasi yang layak. Pengukuran sanitasi dilakukan dengan penyediaan system penanganan limbah secara komunal atas pemasangan jaringan sanitasi (SR/Sambungan Rumah) di wilayah Hinterland dan kelurahan di mainland yang merupakan lokasi pesisir pantai dengan jumlah SR akhir tahun 2020 berjumlah 1.580 atau sekitar 7.900 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan baru Tangki Septitank Skala Komunal di beberapa lokasi. Daftar pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan sanitasi diantaranya :

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang (DAK Reguler) (40 SR atau 200 jiwa)
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang (DAK Reguler) (40 SR atau 200 jiwa)
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang (DAK Reguler) (20 SR atau 100 jiwa)
4. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang (DAK Afirmasi) (30 SR atau 150 jiwa)
5. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang (DAK Afirmasi) (40 SR atau 200 jiwa)
6. Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Pulau Akar Kel. Setokok Kec. Bulang (1 lokasi)
7. Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Kel. Pemping Kec. Belakang Padang (1 lokasi)



Tabel 3.9. :
REKAPITULASI SR SANITASI KOTA BATAM s.d akhir Tahun 2020

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.BULANG LINTANG	Pembangunan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.JALOH	Pembangunan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.MECAN	Pembangunan di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.GERANTING	Pembangunan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sekupang	IPAL Komunal	29	145	KSM KAMPUNG BUKIT	Pembangunan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM TANJUNG SENGKUANG	Pembangunan di Tahun 2012
7.	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM BULANG KEBAM	Pembangunan di Tahun 2012
8.	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	MCK+	25	125	KSM PULAU SERAYA	Pembangunan di Tahun 2012
9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM AIR RAJA	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM PULAU ABANG	Pembangunan di Tahun 2015
11.	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM LANCANG KUNING	Pembangunan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM TIANGWANGKANG SUKSES	Pembangunan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	CV. ADELIA PRATAMA	Pembangunan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM PECUNG MANDIRI	Pembangunan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Nongsa	IPAL Komunal	44	220	KSM PUNGGUR SEHAT SEJAHTERA	Pembangunan di Tahun 2017
16.	Subang Mas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM SUBANG MAS CEMERLANG	Pembangunan di Tahun 2017
17.	Sekanak	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM MELAYU BERSATU	Pembangunan di Tahun 2018
18.	Pulau Lengkang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM LENGKANG BERSATU	Pembangunan di Tahun 2018
19.	Pulau Mecan	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM MECAN JAYA	Pembangunan di Tahun 2018
20.	Pulau Sarang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM SARANG BERSATU	Pembangunan di Tahun 2018
21.	Pulau Kasu	Kasu/Belakang Padang	Komunal Kombinasi	225	1,125	KSM KASU JAYA	Pembangunan di Tahun 2018
22.	Pulau Ngenang	Ngenang/Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM NGENANG JAYA	Pembangunan di Tahun 2018
23.	Pulau Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	IPAL Komunal	105	525	HINTERLAND BERBAKTI	Pembangunan di Tahun 2019
24.	Pulau Karas	Karas/Galang	IPAL Komunal	84	420	KSM GALANG GEMILANG	Pembangunan di Tahun 2019



25.	Pulau Lance	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	35	175	LANCE GEMILANG PERMAI	Pembangunan di Tahun 2019
26	Tanjung Riau Kecamatan	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM TANJUNG RIAU ELOK	Pembangunan di Tahun 2020
27	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM CATE BERSIH	Pembangunan di Tahun 2020
28	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM SEMBULANG JAYA	Pembangunan di Tahun 2020
29	Bulang Lintang Kecamatan	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM BULANG LESTARI	Pembangunan di Tahun 2020
30	Pantai Gelam Kecamatan	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM MAJU BERSAMA	Pembangunan di Tahun 2020
				1.580	7.900		

Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2016 s.d 2021 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah melaksanakan 3 kegiatan guna meningkatkan pelayanan sanitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Reguler dan DAK Afirmasi) .

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pada Tahun 2020 dirancang peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat. Selain itu keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai
2. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.



3. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah
4. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK baik untuk penyediaan sarana air bersih maupun sanitasi komunal.

Faktor-faktor yang menghambat / kendala pencapaian sasaran :

1. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana sanitasi yang mengalami kerusakan kurang optimal, sehingga pemeliharaan menunggu dana dari Pemerintah.
2. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
3. Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
4. Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan coast yang tidak sedikit.

Sasaran Strategis IV
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Berkualitas

Tabel 3.10. :
Analisis Pencapaian Sasaran IV

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cakupan pelayanan administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	perkantoran															
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pelaksanaan rutinitas yang dilaksanakan guna terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian Aparatur Sipil Negara keseharian. Berdasarkan cakupan pelayanan administrasi perkantoran adalah berupa pelaksanaan kegiatan yakni :

- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap, Upah Buruh/Tenaga Kerja, Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis, Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis, Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas, Belanja Rekening Telepon, Belanja Rekening Air, Belanja Rekening Listrik, Belanja Langganan Surat Kabar Majalah dan Tabloid, Belanja Propaganda Promosi Pameran dan Iklan, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Pencetakan dan Penjilidan, Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Belanja Retribusi daerah.

Selain pelaksanaan pengadministrasian juga dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang kelancaran dalam beraktifitas diantaranya :

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer, Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor, Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon, Pemeliharaan Kantor Polsek Kecamatan Batam Kota, Penataan Ruang Kantor Koramil 01/Batam Timur beserta Sarana Prasarana pendukung lainnya dan DED Pembangunan Rusun Mako Brimob Polda Kepri

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :



1. Komitmen dari pimpinan untuk pelaksanaan pengadministrasian tetap terlaksana walaupun kondisi keuangan yang mengalami defisit.

Faktor-faktor yang menghambat / kendala pencapaian sasaran :

1. Akibat defisit anggaran belanja modal pengadaan rutinitas untuk penunjang sarana dan prasarana dikurangi, sehingga terganggunya pelaksanaan aktifitas ASN.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun anggaran 2020 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar **Rp 87.831.013.101,84** baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung.

Tabel 3.11. :
Realisasi Keuangan BTL dan BL

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja		.	
1.1	Belanja Tidak Langsung	9.799.387.278.60	9.376.281.098,-	10.68 %
1.2	Belanja Langsung	78.031.625.823,24	72.591.306.333,10	82.65 %
	TOTAL BELANJA	87.831.013.101,84	81.967.587.431,10	93.32 %
	SISA ANGGARAN	5.863.425.670,74		6.68%

Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan anggaran yang disediakan sesuai dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Program/Kegiatan (Belanja Langsung) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. :
Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran/Program/Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Penyerapan Dana
1.	Me nin gk atn	Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	30,290,242,367.04	25,748,201,533.18	4,542,040,834	33.00 %



		1. Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam	18,799,986,312.34	18,545,062,235.34	254,924,077.-	23.77 %
		2. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan	5,240,161,704.70	5,204,404,947.84	35,756,757.86	0.12 %
		3. Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi	111,000,000.00	93,000,000.00	18,000,000.-	2.44 %
		4. Revitalisasi Masjid di Kota Batam	6,139,094,350.00	1,905,734,350.00	4,233,360,000.-	33.00 %
2.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	318,458,000.00	278,505,000.00	39,953,000.00	0.36%
		1. Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam	131,900,000.00	99,000,000.00	32,900,000.-	0.13 %
		2. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam	75,008,000.00	70,355,000.00	4,653,000.-	0.09 %
		3. Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pemanfaatan Kawasan	111,550,000.00	109,150,000.00	2,400,000.-	0.14 %
3.	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	43,665,448,556.20	43,207,259,924.67	458,188,631.53	55.37 %
		1. Operasional UPT Air Bersih	6,361,073,880.00	6,266,476,316.00	94,597,564.-	8.03 %
		2. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih	7,477,418,889.20	7,476,540,506.50	878,383.70	9.58 %
		3. Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi	1,234,549,375.00	1,234,549,375.00	-	1.58 %
		4. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD	3,628,030,114.02	3,267,172,719.05	360,857,395.97	4.19 %
		5. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam	4,586,322,819.98	4,585,972,898.00	349,922.98	5.88 %
		6. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi)	16,807,495,000.00	16,806,239,486.00	1,255,514.-	21.54 %
		7. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler)	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	1.60 %
		8. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam	1,147,187,478.00	1,146,937,624.12	249,854.88	1.47 %
		9. Pemasangan SR (sambungan rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam	273,371,000.00	273,371,000.00	-	0.35 %
		10. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK AFIRMASI)	900,000,000.00	900,000,000.00	-	1.15 %
4	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,002,888,000.00	1,679,579,480.00	323,308,520.-	2.15 %
		1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,002,888,000.00	1,679,579,480.00	323,308,520.-	2.15 %
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,754,588,900.00	1,677,760,395.25	76,828,504.75	2.15 %
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan	1,599,047,000.00	1,524,970,295.25	74,076,705.75	1.95 %
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000.00	19,500,000.00	500,000.-	0.02 %
		3. Sarana dan Prasarana Aparatur	135,541,900.00	133,290,100.00	2,251,800.-	0.17 %
TOTAL PAGU			78.031.625.823,24	72.591.306.333,10	5.440.319.490,14	93.03



4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator menunjukkan sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis I** : meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak. Didukung anggaran dari Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan sebesar **Rp. 30,290,242,367.04** atau **38.82 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 25,748,201,533.18** atau **33.00 %** Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :
 - Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan keamanan dan kenyamanan. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **174.66 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**
 - Penyelenggaraan bangunan gedung. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**
- **Sasaran Strategis II** : Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten. Didukung anggaran dari program Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang sebesar **Rp. 318,458,000.00** atau **0.41 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 278,505,000.00** atau **0.36%**

Terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yakni :

- Ketersediaan dokumen tata ruang dan kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **150.51 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**

- **Sasaran Strategis III** : Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di Hinterland. Didukung anggaran dari Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi sebesar **Rp. 43,665,448,556.20** atau **55.96 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 43,207,259,924.67** atau **55.37 %**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **105.23 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**
- Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **106.34 %** dengan interpretasi **Melampaui Target**

- **Sasaran Strategis IV** : didukung anggaran dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. **2,002,888,000.00** dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. **1,754,588,900.00 (Rp. 3.757.476.900,-)** atau **4.82 %** dari Total Belanja Langsung. Realisasi sebesar **Rp. 3.357.339.875,25** atau **4.30 %**

Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yakni :

- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**
- Cakupan sarana dan prasarana aparatur. Capaian Kinerja pada tahun 2020 sebesar **100 %** dengan interpretasi **Mencapai Target**



Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indicator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, capaian kinerja rata-rata pada tahun 2020 dengan interpretasi **Melampaui Target.**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 87.831.013.101,84** dan realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 81.967.587.431,10** mencapai **93.32 % terdiri dari :**

- a. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis/Belanja Langsung sebesar **Rp. 78.031.625.823,24** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 72.591.306.333,10** dengan prosentase penyerapan keuangan sebesar **82.65 %.**
- b. Alokasi anggaran untuk pencapaian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 9.799.387.278.60** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.376.281.098,-** dengan prosentase penyerapan keuangan sebesar **10.68 %.**

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kegiatan perencanaan/ DED (*Detail Engineering Design*) dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan fisik dapat dilakukan pada awal tahun sehingga waktu pekerjaan fisik lebih efisien .
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi penyedia jasa kontruksi dengan berkerjasama baik dengan Kementrian PUPR maupun lembaga pengembangan jasa kontruksi dan asosiasi - asosiasi yang terkait dengan kontruksi.



- c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum baik dari segi perencanaan dan pengawasan/*supervise* yaitu dengan peningkatan kualitas manajemen proyek dari suatu program dan kegiatan. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam melalui pendidikan dan pelatihan teknis.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- e. Meningkatkan kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih cermat dan akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, serta faktor - faktor yang terkait lainnya, sehingga Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan dapat meminimalisir kendala-kendala di lapangan.

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



SUHAR, ST

Pembina TK. I

NIP. 19740316 200003 1 003

